

**PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

**Harmoko¹, Dewi Anggun Oktaviani¹, Mastina Maksin², Veronica Sri Astuti
N.³, Eko Wahyono⁴, Moch. Su'ud⁶, Tedy Herlambang⁷, Rahma Wati⁸, Noer
Aini Kusniawati⁹**

Program Studi Hukum¹, Fakultas Hukum,
Program Studi Agribisnis², Fakultas Pertanian,
Universitas Panca Marga

Jl. Yos Sudarso No. 107 Telp. (0335) 422715 Probolinggo 67217
Email: dewianggunoktaviani@upm.ac.id¹, Mastinamaksin@upm.ac.id²,
veronica@upm.ac.id³, eko.wahyono@upm.ac.id⁴, harmoko@upm.ac.id⁵,
mochammad-suud02@gmail.com⁶, bangtedy@upm.ac.id⁷,
rahmafndi@gmail.com⁸, noeraini270202@gmail.com⁹

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan proses dan pembelajaran akan hak, tugas dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan program pamong praja memunculkan permasalahan kurangnya pemahaman pendidikan politik menjelang pemilu dari sudut pandang UU No. 7 Tahun 2017 bagi warga Desa Adat Kecamatan Dringu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diberikan nasehat pendidikan politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pemahaman dan kesadaran serta minat dalam menyuarakan hak pilih dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan melalui pendidikan masyarakat salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat Menjelang Pemilu yang diawali dengan observasi dan wawancara untuk mengetahui masalah yang ada di masyarakat. Pendidikan politik pada pemilu di demokrasi negara Indonesia dinilai masih belum tinggi. Karena perasaan campur aduk, banyak masyarakat yang memilih golput dalam pemilu. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat diharapkan menjadi generasi pendidikan politik dan kondisi politik, hukuman atas gangguan dan pemahaman pendidikan politik di salah satu bagiannya. Mempromosikan pendidikan politik juga mengupayakan agar komunitas budaya lokal tidak hanya menjadi objek politik tetapi juga bertindak sebagai subjek politik.
Kata Kunci : pendidikan, politik, dan pemilu.

ABSTRACT

Political education is a process and learning about the rights, duties and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. The implementation of the civil service program raises the problem of a lack of understanding of political education ahead of the election from the point of view of Law no. 7 of 2017 for residents of the Traditional Village of Dringu District. To overcome these problems, political education advice is given with the aim of increasing knowledge, understanding, understanding and awareness as well as interest in voicing the right to vote in elections. The method used is to speak directly to the community. Political education in elections in the democratic state of Indonesia is considered to be still not high. Due to mixed feelings, many people voted for white citizens (abstained) in the elections. One effort to overcome this problem is to organize political education for the indigenous people themselves. Indigenous

peoples are expected to become a generation of political education and political conditions, punishment for disturbance and understanding of political education in one of its parts. Promoting political education also strives for local cultural communities not only to become political objects but also to act as political subjects.

Keywords: Education, politics, and elections.

PENDAHULUAN

Memasuki tahun politik yang semakin dekat, masyarakat harus memiliki kesadaran yang cukup terhadap politik dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintahan, organisasi, lembaga dan tujuan suatu negara atau pemerintahannya. Ilmu politik, disiplin ilmu tertua di dunia, mempelajari konsep dan gagasan filosofi tertentu serta mengamalkannya dengan mempertanyakan dan menganalisis bagaimana suatu bangsa dapat ditata agar masyarakatnya hidup sejahtera dan bahagia. Hak-hak seperti kebebasan pers, hak menyatakan pendapat, hak menjalankan agama, dan hak berorganisasi dilindungi di negara demokrasi. Dalam demokrasi, setiap orang mempunyai kebebasan yang sama dan tidak ada diskriminasi. Nilai-nilai dan martabat setiap manusia, oleh karena itu tujuan pendidikan haruslah mendidik individu dan anak manusia agar dapat berkembang dan memperoleh kebebasan seutuhnya.

Kebanyakan masyarakat belum mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bukan hak dan kewajibannya sendiri. Sebaliknya, jika mereka menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, mereka dapat berpartisipasi dan mengubah sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut, sehingga berdampak pada kehidupan mereka. Masyarakat yang belum mengetahui cara berpolitik menunjukkan bahwa pendidikan politik di dalam negeri belum efektif. Oleh karena itu, negara sangat memperhatikan pendidikan warganya, sehingga pendidikan harus diprioritaskan dan direncanakan semaksimal mungkin (Rudy Hartono, 2016).

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat. Masyarakat merupakan potensi sumber daya manusia yang harus dibangun dan dikomunikasikan. Agar mereka dapat berpartisipasi dalam politik, mereka juga harus mendapatkan pendidikan politik yang memadai, dan apa yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik memerlukan arahan dan bimbingan. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokrasi di mana warga suatu negara memilih perwakilan dibadan pemerintah seperti parlemen atau dewan lokal. Pemilu dimaksudkan untuk memberikan warga negara hak dan kekuasaan untuk memilih pemerintahan yang mewakili dan mengurus kepentingan mereka. Maka dari itu tim pengabdian mengadakan sosialisasi yang bertepatan Pentingnya Pendidikan Politik Bagi masyarakat Menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif UU no. 7 Tahun 2017 khususnya bagi masyarakat yang ada di desa Pabean kabupaten Probolinggo.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pendidikan masyarakat yang salah satunya bisa melalui sosialisasi yang akan tim pengabdian laksanakan. Dimana tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif UU Nomor 7

Tahun 2017. Ada beberapa tahapan yang tim lakukan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini seperti sebagai berikut:

Observasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sebelum mengadakan kegiatan sosialisasi ini, kami tim pengabdian melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di desa pabean. Apa saja yang mereka butuhkan menjelang pemilu tahun 2024, dimana di tahun ini pastinya sudah banyak bertebaran informasi-informasi yang kadang belum jelas sumbernya, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan masyarakat sendiri untuk kepentingan parpol, dan masih banyak lagi. Maka dari itu masyarakat memerlukan pengetahuan mengenai pendidikan politik untuk menghadapi pemilu di tahun depan. Supaya masyarakat juga tidak mudah terprovokasi antara satu dengan yang lain hanya karena beda parpol pilihannya. Dari pengamatan tersebut kami menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat masih memerlukan pengetahuan mengenai politik apalagi menjelang pemilu tahun depan.

Tim pengabdian juga melakukan wawancara kepada ibu Tinggi mengenai sosialisasi yang akan tim kami lakukan di desa pabean ini. Beliau menyetujui kegiatan tersebut karena sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2017 memang cukup diperlukan oleh masyarakat mengingat tahun ini mendekati pemilu, jadi kita memerlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai politik supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks yang bertebaran dan juga kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan bijak karena apa yang kita pilih nantinya akan berdampak bagi kehidupan kita selama lima tahun kedepan. Kita memberikan penjelasan kepada ibu Tinggi mengenai acara sosialisasi ini, menyampaikan juga susunan acara sehingga beliau bisa menyetujui acara tersebut. Setelah meminta izin kepada kepala desa pabean bahwa tim kkn akan melakukan kegiatan sosialisasi, beliau pun menyetujui dan memfasilitasi acara kita ini.

Sosialisasi Kegiatan

Setelah observasi tersebut, tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2017. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menerapkan metode pendidikan masyarakat salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa Pabean. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 di aula kantor kepala Desa Pabean yang dihadiri oleh masyarakat Desa Pabean tersebut. Acara dimulai dari sambutan dari perwakilan kepala desa karena beliau berhalangan hadir maka diserahkan ke Bapak Supardi, lalu sambutan dari Bu Anggun selaku DPL KKN Desa Pabean. Acara selanjutnya pemaparan materi dari dosen fakultas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya dilihat secara keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat Desa Pabean Kecamatan Dringu menjelang pemilu tahun 2024 berjalan dengan baik dan sesuai jadwal. Tercapainya keberhasilan kegiatan sehingga berjalan lancar dan sukses berkat dukungan berbagai pihak, antara lain Kepala desa dan stafnya, tim kuliah kerja nyata desa pabean, RT, dan masyarakat Desa Pabean Kecamatan Dringu.

Kuliah Kerja Nyata berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 29 Agustus 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok Pengabdian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat melakukan Program kegiatan Sosialisasi untuk Masyarakat Desa Pabean, Kecamatan Dringu. Pertama, proses pelaksanaan kegiatan ini dikonfirmasi oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Sulistiono, Kepala Desa Pabean No. 119, Dusun Cabean, Kecamatan Dringu. Setelah persetujuan bersama, para mahasiswa langsung memulai persiapan program sosialisasi. Kedua, membuat surat permohonan ACC dengan dosen dari Universitas Panca Marga untuk menjadi pematani.

Ketiga, langkah berikutnya adalah menentukan berbagai perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi, seperti membuat banner, memesan makanan (Roti dan Nasi Kotak), dan menyebarkan undangan kepada masyarakat RT/ RW setempat. Keempat, program sosialisasi ini dimulai dengan melakukan peninjauan lokasi yang telah diputuskan bersama, yaitu di Desa Pabean. Terakhir kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 di balai desa pabean. Jadwal kegiatan sosialisasi dapat dilihat di table dibawah ini:

Tabel 1. Jadwal kegiatan sosialisasi

No	Waktu Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan
1.	31 Juli 2023	Observasi ke Balai Desa Pabean
2.	01 Agustus 2023	Wawancara bersama Kepala Desa
3.	05 Agustus 2023	Wawancara bersama Ibu Kepala Desa
4.	10 Agustus 2023	Pembuatan Surat Kepada Dekan Fakultas Sospol dan Fakultas Hukum
5.	10 Agustus 2023	Pembuatan surat undangan kepada PPPI RT.02 RW.06 dan warga Desa Pabean
6.	11 Agustus 2023	Prepare Acara Sosialisasi
7.	12 Agustus 2023	Pelaksanaan Sosialisasi

Sumber : LPJ Kegiatan Proker KKN Desa Pabean fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Di dalam proses kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif Undang-undang nomor 7 tahun 2017 berikut ini beberapa dokumentasi yang diambil ketika acara sedang berlangsung.



Gambar 1. Pemaparan materi 1



Gambar 2. Pemaparan materi 2



Gambar 3. Pemaparan materi 3

Sumber : LPJ Kegiatan Proker KKN Desa Pabean fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Kegiatan sosialisasi dari tim kuliah kerja nyata kali ini mengambil tema Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2017. Kegiatan sosialisasi ini dari persiapan kegiatan sampai check in mengalami kendala kurangnya persiapan dari tim kkn dan juga para peserta datang terlambat ketika mengikuti acara tersebut sehingga ada keterlambatan waktu untuk acara dimulai. Setelah acara dimulai semua susunan acara yang telah dibuat berjalan dengan lancar. Para dosen pemateri menyampaikan presentasinya dengan baik Ketiga dosen pemateri bisa memaparkan informasi yang sesuai dengan tema yang tim kkn ambil. Ada proses penyerahan sertifikat kepada ketiga dosen pemateri tersebut juga berjalan dengan lancar dan para peserta juga tertib ketika kegiatan ini berlangsung. Tata cara atau teknik penanaman atau penciptaan nilai-nilai politik dalam program pendidikan politik merupakan suatu mekanisme. Mekanisme implementasi kebijakan pendidikan politik biasanya dibentuk melalui standar operasional prosedur (SOP). SOP dapat digunakan sebagai panduan tindakan bagi pelaksana proyek. Dengan demikian, tujuan dan sasaran kebijakan diimplementasikan dalam kebijakan program pendidikan politik. Menurut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda, ada tiga mekanisme. Yang pertama adalah yang paling mendasar dan paling mudah diperoleh yaitu ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang kesadaran politik. Sering disebut sebagai moralitas kognitif. Kedua, melibatkan masalah sikap (emosional). Kali ini

mebutuhkan lebih banyak latihan dan usaha. Tahap terakhir adalah tindakan atau perilaku yang mengikuti pendidikan politik.

Dari penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini memiliki beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut:

Faktor Penghambat

- a. Keterlambatan pemulaian acara dari susunan acara yang telah dibuat
- b. Kurangnya disiplin dari para panitia kkn
- c. Kurangnya kekompakan dan mis komunikasi antar tim
- d. Para peserta datang terlambat

Faktor Pendukung

- a. Acara bisa berjalan dengan lancar
- b. Para pemateri datang tepat waktu
- c. Tim kkn bisa mengheandle acara

KESIMPULAN

Sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2017 merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang sudah dilaksanakan oleh tim pengabdian Desa Pabean untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pendidikan politik menjelang pemilu tahun depan karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, bisa memilah berita yang beredar, bisa mengerti mengenai politik dana apa saja yang menjadi unsur yang ada didalamnya. Acara ini berjalan dengan baik walaupun ada faktor penghambat tetapi juga ada faktor pendukung yang menunjang kegiatan tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini semoga masyarakat bisa lebih paham lagi mengenai pendidikan politik untuk bisa beradaptasi ditengah tahun-tahun politik nantinya. Pasti memiliki dampak positif bagi masyarakat ke depannya untuk lebih hati-hati dan lebih cermat lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala desa Pabean, jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 dalam perspektif Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hartono Rudy. 2016. Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [2] Kelompok Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Desa Pabean Mengadakan Sosialisasi Guna Menghadapi Tahun-Tahun Politik. – PERISAIHUKUM.COM . 17 Agustus 2023
- [3] Kuswati, Yeti. (2019). Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Karang Taruna Kecamatan Panyingkiran. Jurnal Parahita Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 52-62.

- [4] Luciana Gurning, Fretty, dkk. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024. *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)*, 1(1), 34-39.
- [5] Ridha Iswardhana, M., dkk. Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di SMAN 4 Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisplin (JAMMU)*, 2(1), 6-10.
- [6] Zairudin, Ahmad, Abdurrahma, Muhammad Irfan Faqih. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Communnity Development*, 3(3), 1809-1815.